

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
PERNYATAAN JURNAL.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR DIAGRAM.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
INTISARI	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Tentang Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).....	15
1. Tinjauan Tentang Peranan Notaris.....	15

2. Tinjauan Tentang Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).....	19
B. Tinjauan Tentang Pengalihan Hak Atas Tanah.....	23
C. Tinjauan Tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli.....	26
1. Pengertian Perjanjian Pengikatan Jual Beli.....	26
2. Bentuk & Alasan dibuatnya Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan	27
D. Tinjauan Tentang Pajak Penghasilan (PPh).....	30
1. Definisi & Pengaturan Tentang Pajak Penghasilan (PPh).....	30
2. Konsep Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan.....	35
3. E-PHTB Notaris-PPAT	38
E. Tinjauan Tentang Asas Efisiensi dan Asas Kemanfaatan.....	49
1. Tinjauan Tentang Asas Efisiensi.....	49
2. Tinjauan Tentang Asas Kemanfaatan.....	51
BAB III METODE PENELITIAN.....	52
A. Jenis dan Sifat Penelitian....	52
B. Lokasi Penelitian.....	53
C. Sampel dan Subjek Penelitian.....	53
D. Cara dan Alat Pengumpulan Data.....	55
E. Tahap Penelitian.....	58
F. Analisis Data.....	59

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	60
A. Realisasi Pemanfaatan Sistem Elektronik <i>e-PHTB</i> Notaris-PPAT Terkait Pajak Penghasilan (PPh) Atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan.....	60
1. Penggunaan Sistem Elektronik <i>e-PHTB</i> Notaris-PPAT Dengan Surat Kuasa Menurut Pasal 32 ayat (3a) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan berkaitan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.....	64
2. Kedudukan Notaris-PPAT Melalui <i>e-PHTB</i> Notaris-PPAT Menurut Pasal 32A Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan berkaitan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan... ..	74
B. Kesesuaian Sistem Elektronik <i>e-PHTB</i> Notaris-PPAT Dalam Proses Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan dengan Asas Efisiensi dan Asas Kemanfaatan.....	79
BAB V PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN.....	103